LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip *"good governance"* yang menjadl persyaratan bagi setiap instansi, dafam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sumber daya tersebut di atas meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Lakip Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian, selanjutnya disebut Lakip, telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja lnstansi Pemerintah dan surat Sekretariat Daerah Nomor 060/03/I/2023/Org, tanggal 09 Januari 2023.

Lakip Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan tugas maupun fungsi Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……1

DAFTAR ISI……2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……..3

B. Maksud dan Tujuan……....4

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah……5

D. Isu-Isu Strategis……..……10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis……12

B. Indikator Kinerja Utama……12

C. Rencana Kerja Tahunan……..19

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022……36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja……37

B. Analisis Capaian Kinerja……...40

C. Realisasi Keuangan……...47

BAB IV PENUTUP……..50

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance)*. Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Proses penyusunan Laporan Kinerja yang dilakukan bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai bentuk

pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Yaitu:
  1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
  2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
  3. Menilai akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar kedepan.
  5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun berikutnya.

  Sementara itu LAKIP memiliki dua Fungsi utama, Pertama, Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai upaya memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua Fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan

dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik da Persandian atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang diperoleh merujuk pada sejauh mana visi,misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2022.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bagi upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

   Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

Berdasarkan kebijakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik da Persandian adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendifinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, secara selaras setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan stratejik tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil dicapai. pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

- Tugas Pokok

  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

- Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika,Statistik dan persandian;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri dari
    1) Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum
    2) Sub Bagian Keuangan
    3) Sub Bagian Program;
c. Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari
    1) Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik
    2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    3) Seksi Layanan Informasi Publik;
d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :

1) Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan
2) Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi
3) Seksi Pengolahan Data dan e-Government;

e. Bidang Statistik, terdiri dari :

1) Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Metadata;

f. Bidang Persandian, terdiri dari :
   1) Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian
   2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

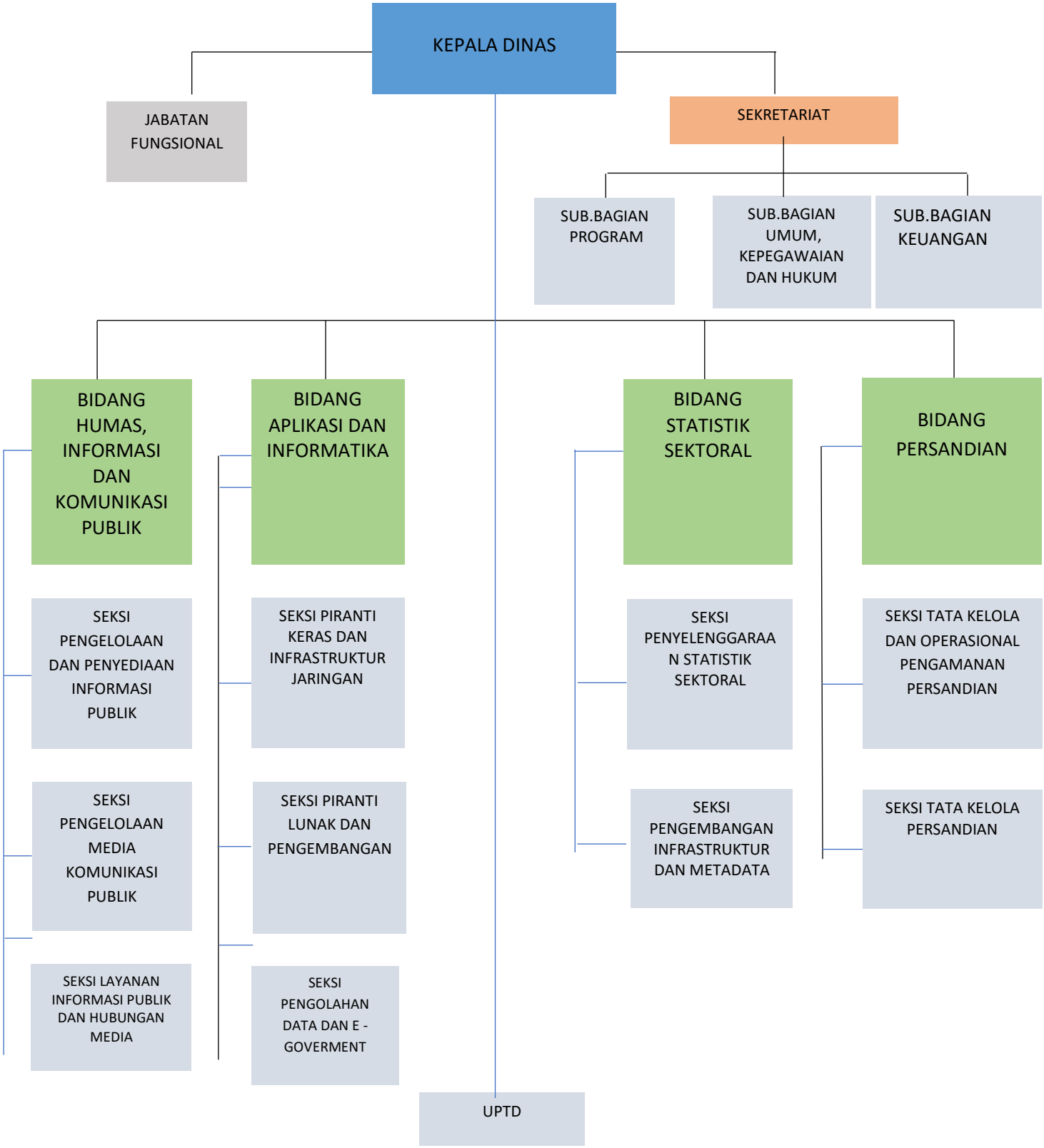

D. Isu- isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 tahun mendatang. Dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi webite online
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.

7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dilihat dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar data Januari s/ d Desember 2022 sebanyak 30 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol.	Jabatan				Ket.
			JPT	Administrator	Pengawas	Pelaksana	
1	Drs. Ahmad Yani 196703121992031004	Pembina Utama Muda, IV/c					Kadis
2	Sitti Rahmaniah, S.H. 197405152003122009	Pembina Tk I, IV/b		√			
3	Mustainah, S.Sos 197810252007012020	Penata, III/c			√		
4	A.A.S. Rakhmat, S.Ap. 197509132007011013	Penata Muda Tk.1, III/b			√		
5	Nita Sari, S.H. 198112142015032001	Penata , III/c			√		
6	A.Sandra Esty Abriany, S.E. 198309232009032007	Penata Tk.1, III/d		√			
7	Marzuki Adam, S.Kel 197705032006041019	Pembina, IV/a		√			
8	Hj. Andi Dwiyanti Musrifah, S.e.,M.M. 197605022014072020	Penata Tk.I, III/d		√			
9	Hasanuddin Hamid,ST,M.Han 197804120070110002	Penata , III/c		√			
10	Nurwahidin, S.Sos 198308242015031003	Penata Muda Tk I, III/b			√		
11	Muhammad Alif, S.Kom 197505132009031003	Penata Tk.I, III/d			√		
12	Andi Afdal Absari, ST 198412042010011028	Penata , III/c			√		
13	Iswar Tita Adinata, S.Sos 198405052010011013	Penata , III/c			√		
14	Andi Jaelani.S.P 196711151998031006	Penata Tk.I, III/d			√		
15	Hidayat, ST 197706122014071005	Penata Muda III/a			√		
16	Mar'awati, S.STP 199408232016092001	Penata Muda Tk I, III/b			√		
17	Yusniati, S.IP.MPA. 198506222011012016	Penata Tk I, III/d			√		
18	Muhammad Ikbal 197610192011011003	Penata Muda Tk I, III/b			√		

19	Suhrawardi 198007022008011015	Pengatur Tk I, IId				√	
20	Nur Ihsan Rusli 197905092014101001	Pengatur Muda Tkl I, II/b				√	
21	Asmin Salmin, S.Ag 197201262007011010	Penata, III/c				√	
22	Murah Kurniadi 198411242006041004	Pengatur, II/c				√	
23	Andi Marwiyah, S.Si,M.M 196903221997032008	Pembina, IV/a				√	
24	Firman 19770032007011016	Pengatur Tk I, IId				√	
25	Ridwan 196909262007011019	Pengatur Tk I, II/d				√	
26	Muhammad Ashar 197903112009031004	Pengatur, II/c				√	
27	Sumiati 196904012006042027	Pengatur Tk I, II/d				√	
28	Heni Anggriati Abd. Rasyid 198612092014072003	Pengatur Muda Tk I, II/b				√	
29	Abdul Rachman Azis 19720113199031005	Penata, III/c				√	
30	Nur Jannah 197806052007012032	Pengatur Tk I, II/d				√	
Jumlah			-	5	12	13	

Bila dilihat dari Kuantitas PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian cukup memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya masih jauh dari harapan, terutama dalam hal disiplin ilmu dan etos kerja.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah (Unit)	Ket
1.	Gedung Kantor	1	
2.	Sepeda Motor	16	
3.	Lemari Besi		
4.	Lemari Buku Arsip	1	

5.	Kursi Rapat	1	
6.	Kursi Tamu	4	
7.	Meja Kerja	6	
8.	Kursi Kerja	5	
9.	Lemari Es	1	
10.	AC Unit	8	
11.	Televisi	1	
12.	P.C Unit/Komputer PC	6	
13.	Lap Top	14	
14.	Printer	12	
15.	Mobil Jabatan	7	
16.	Mobil Operasional	1	
17.	Kursi Putar	4	
18.	Meja Rapat	1	
19.	Kamera	7	
20.	Note Book	2	
21.	Alat Rumah Tangga lain-lain	8	
22.	Tripod	1	
23.	Alat Pembantu Kebakaran	3	
24.	Megaphone	1	
25.	Papan Visual/Papan Nama	1	

26.	Alat Studio Lainnya/Drone	1	
27.	Lensa kamera	2	
28.	Alat Komunikasi Radio	3	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada akhir Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020, dan mulai dijalankan pada Tahun 2021.

Oleh karena itu, Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Rencana Strategis.

B. Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perangkat daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan selayar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan indikator kinerja utama dengan keputusan Kepala Dinas KominfoSP Nomor : 1.01/I/2021,Tanggal 04 Januari 2021 sebagai berikut :

Tabel 1
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target 2022
1.	Meningkatnya Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	CC
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Opini / Predikat SAP	Persentase	Sesuai
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DiskominfoSP	Hasil Survey Respoden	Persen	70,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada setiap urusan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik	Jumlah PD yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik/Jumlah PD x 100	Persen	30
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat	2,3
5.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Public yang berkualifikasi	- Persentase PPID yang aktif	Jumlah PPID yang Aktif/Jumlah PPID x 100	Persen	50

		- Persentase KIM yang aktif	Jumlah KIM yang Aktif/Jumlah KIM x 100	Persen	51,1
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan informatika daerah	Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	Jumlah Desa/Kel yang terlayani Jaringan Telekomunikasi/Jumlah Desa/Kel x 100	Persen	70
7.	Terselenggaranya Pelayanan Data Statistik Sektoral sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	- Jumlah Data Sektoral yang disertai metadata dan didesiminasi	Jumlah Data Statistik Sektoral dan Metadata yang diDesiminasi	Data	250
		- Jumlah SDM pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic sektoral	Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral	Orang	65
		- Jumlah infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data	Jumlah Infrastruktur Data Yang tersedia	Aplikasi	1
8.	Meningkatnya Pengelolaan Persandian Daerah	Indeks keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Penerapan KAMI berdasarkan kriteria SNI ICO/IEC 27001	Tingkat	Tingkat I
9.	Meningkatnya sarana Telekomunikasi	- Persentase Desa yang terjangkau sarana telekomunikasi	Jumlah Desa yang terjangkau sarana telekomunikasi/Jumlah Desa/Kel x 100%	Persen	82
		- Persentase Desa yang menggunakan website desa	Jumlah Desa yang menggunakan Website Desa/Jumlah Desa/Kel x 100%	Persen	40

C. Rencana Kerja Tahunan

Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) sub kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Pearturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pengadaan Mebel

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku kepentingan

2. Program Aplikasi Informatika

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
   - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Penatalakasanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
   - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
   - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
   - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
   - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
   - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
   - Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disem
      - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
      - Membangun Metadata Statistik Sektoral
      - Peningkatan Kapasitan Kelembagaan Statistik Sektoral
      - Pengembangan Infrastruktur
      - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
4. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi
   a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas KominfoSP memperoleh pagu anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 8.289.328.878,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) degan realisasi sebesar Rp. 8.152.424.485,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Atau 98,35%, dengan rincian :

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Program

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.543.918.878,-**	**5.433.554.959,-**	**98,01**	**110.363.919,-**
2.	**Informasi dan Komunikasi Publik**	**1.263.291.000,-**	**1.263.170.200,-**	**99,99**	**120.800,-**
3.	**Aplikasi Informatika**	**647.855.400,-**	**633.737.633,-**	**97,82**	**14.117.767,-**
4.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**209.843.000,-**	**197.703.494,-**	**94,22**	**12.139.506,-**
5.	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**624.420.600,-**	**624.258.199,-**	**99,97**	**162.401,-**

Tabel 3. Penyerapan Anggaran per jenis Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	**Belanja Pegawai**	**2.387.590.000,-**	**2.301.132.505,-**	**96,40**	**86.457.495,-**
2.	**Belanja Barang**	**2.718.507.100,-**	**2.718.507.100,-**	**100**	**-**
3.	**Belanja Modal**	**164.217.500,-**	**162.236.000,-**	**98,79**	**1.981.500,-**

D. Perjanjian Kinerja 2022

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik da Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Bupati Kepulauan Selayar ditetapkan, sebagai berikut :

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi komunikasi (TIK)	**100 %**
2	Terwujudnya Penyediaan infrastruktur dan Akses komunikasi informasi dalam rangka pelayanan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan akses komunikasi informasi berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar	**100 %**

Jumlah Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2022 adalah Rp.8.289.328.878,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 5.543.918.878,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 1.263.291.000,-
3. Program Aplikasi Informatika Rp. 647.855.400,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 209.843.000,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 624.420.600,-

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**7.455.065.278**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.543.918.878**
I	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**		**32.575.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.975.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.725.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.975.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.225.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.875.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja**		**2.550.314.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	2.529.319.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	8.395.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.100.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4.000.000
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja**	100	**2.462.693.000**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.932.755.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	250.708.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25 Dokumen	68.040.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.190.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	200.000.000
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	**23.308.000**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	23.308.000
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Kinerja**	100	**215.235.161**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.224.800
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49.999.761
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	143.010.600
VI	**Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	**259.793.717**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	41.615.000

	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	116.939.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.396.717
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	61.843.000
B	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100	**1.263.291.000**
I	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola**	**100**	**1.175.000.000**
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik	1 Dokumen	7.587.000
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	24.200.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	867.500.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	293.004.000

	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	7 Layanan	45.000.000
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	26.000.000
C	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi**	100	**647.855.400**
I	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah**	100	**56.778.000**
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	27.329.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	1 Dokumen	16.000.000
II	**Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola**	**100**	**591.077.400**
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175.297.000
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	18.504.000

		Elektronik		
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	730.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	155.071.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	34 OPD	43.625.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 unit	58.737.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	765.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	68.677.400
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*	1 Dokumen	39.547.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	30.124.000

D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia**	**100**	**209.843.000**
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	100	**209.843.000**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	**209.843.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	68.586.000
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	64 Orang	24.443.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	33.264.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	14 OPD	8.233.000
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	57.702.000

	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	17.615.000
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**624.420.600**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Keamanan Informasi Pemerintah**	**100**	**624.420.600**
I	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian**	**100**	**516.415.600**
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	14.892.600
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	237.406.700
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	36.209.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 OPD	227.907.300

I	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian**	**100**	**108.005.000**
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 OPD	108.005.000

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan Bulan Desember 2022 adalah realisasi fisik 98,35% dan keuangan 98,35%. Capaian kinerja pada triwulan I sampai dengan triwulan IV dalam kategori sangat baik, hal ini terjadi karena semua kegiatan dan progres kegiatan sudah berjalan.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan cara untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran atau target kinerja yang ditentukan dalam perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Tabel 1
CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target 2022	Target 2022
1.	Meningkatnya Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	CC	Belum ada hasil pengukuran
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Opini / Predikat SAP	Persentase	Sesuai	Belum ada hasil pengukuran
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DiskominfoSP	Hasil Survey Respoden	Persen	70,00	75,13
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada setiap urusan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik	Jumlah PD yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik/Jumlah PD x 100	Persen	30	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat	2,3	1,83
5.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Public yang berkualifikasi	- Persentase PPID yang aktif	Jumlah PPID yang Aktif/Jumlah PPID x 100	Persen	50	10,81

		- Persentase KIM yang aktif	Jumlah KIM yang Aktif/Jumlah KIM x 100	Persen	51,1	100
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan informatika daerah	Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	Jumlah Desa/Kel yang terlayani Jaringan Telekomunikasi/Jumlah Desa/Kel x 100	Persen	70	91,03
7.	Terselenggaranya Pelayanan Data Statistik Sektoral sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	- Jumlah Data Sektoral yang disertai metadata dan didesiminasi	Jumlah Data Statistik Sektoral dan Metadata yang diDesiminasi	Data	250	235
		- Jumlah SDM pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic sektoral	Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral	Orang	65	21
		- Jumlah infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data	Jumlah Infrastruktur Data Yang tersedia	Aplikasi	1	0
8.	Meningkatnya Pengelolaan Persandian Daerah	Indeks keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Penerapan KAMI berdasarkan kriteria SNI ICO/IEC 27001	Tingkat	Tingkat I	Tingkat II
9.	Meningkatnya sarana Telekomunikasi	- Persentase Desa yang terjangkau sarana telekomunikasi	Jumlah Desa yang terjangkau sarana telekomunikasi/Jumlah Desa/Kel x 100%	Persen	81	79,01
		- Persentase Desa yang menggunakan website desa	Jumlah Desa yang menggunakan Website Desa/Jumlah Desa/Kel x 100	Persen	40	7,40

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022, serta dengan merujuk pada hasil pelaksanaan program/ kegiatan selama tahun bersangkutan, capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat digambarkan, sebagai berikut :

Untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 5.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 6

Tabel Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
A.	**Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**				
1	Nilai Sakip OPD	CC	Belum Keluar		Inspektorat
2	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Belum Keluar		Inspektorat
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kominfo SP	70	75,13	107,32 %	Bappelitbangda

- Untuk indikator Nilai Sakip OPD dan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kominfo SP menunjukkan realisasi 75,13% untuk 3 (tiga) layanan yaitu Ketersediaan Telepon / Internet, Informasi Publik dan Transparansi Publik. Untuk pelayanan ketersediaan Telepon / Internet, Pelayanan Informasi Publik dan Transparansi Publik telah mencapai target karena beberapa daerah telah terjangkau jaringan telekomunikasi.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
B	**Digitalisasi Penyelenggaraan seluruh Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten**				
1	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan Publik	30%	37 OPD	100%	Diskominfo SP (Bidang Humas)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,00	1,83	91,15	Diskominfo SP (Bidang Aptika)
3	Persentase PPID yang aktif	27,03	4 PPID	10	Diskominfo SP (Bidang Humas)
4	Persentase KIM yang aktif	34,1	13 KIM	100	Diskominfo SP (Bidang Humas)

- Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik Tahun 2022 ditargetkan 30 % atau 11 OPD dan terealiasi 100 % atau 37 (Tiga Puluh Tujuh) OPD. Tercapainya target disebabkan karena pada Bulan Desember Tahun 2022, Semua OPD telah menggunakan Layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dengan tujuan untuk mengefisienkan proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping pada beberapa OPD terdapat Layanan Publik lainnya antara lain: Sekretariat Daerah (LPSE), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Layanan Perizinan : Simpelnaker, OSS, Si Cantik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Layanan Kependudukan), Dinas Kesehatan (Layanan Rujukan) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (SP4N LAPOR).
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menunjukkan hasil 1,83

dengan predikat cukup. Menunjukkan target yang ingin dicapai pada tahun 2022 mencapai 91,15%, hal ini didapat dicapai karena beberapa OPD telah menerapkan layanan berbasis elektronik baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Pemerintah Daerah telah Menyusun konsep layanan terintegrasi yaitu Peraturan Bupati tentang Arsitektur SPBE dan telah melalui proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 18 Perangkat Daerah yang telah membangun sistem dalam bentuk aplikasi secara mandiri untuk mempermudah layanan.

- Untuk indikator PPID yang aktif ditargetkan 34,1 % (10 PPID) dan terealisasi 10,81 % (4) PPID yaitu PPID Pembantu pada Dinas Kominfo SP, PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Permukiman. Tidak tercapainya target disebabkan karena pelaksanaan PPID di semua Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara maksimal.

- Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif ditargetkan 34,1 % (13 KIM) dan terealisasi 100% (13 KIM). Capaian target disebabkan karena jangkauan jaringan telah merata di beberapa tempat sehingga akses informasi telah dapat dilakukan dengan cepat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
C.	**Meningkatkan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Daerah**				
5	Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	57	79	138,5	DiskominfoSP (Bidang Aptika)

- Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi ditargetkan 57 %, dan terealisasi 79 % atau capaian 138,5 %, target tercapai disebabkan karena DiskominfoSP telah melakukan identifikasi ketersediaan signal di

semua desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mengetahui kondisi jaringan yang ada disetiap desa. Terdapat 71 Desa dan Kelurahan yang terjangkau jaringan dari 88 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini di dukung dengan Pembangunan Menara telekomunikasi Program 3435 Non 3T Kemkominfo RI di beberapa wilayah yaitu Site Putabangun Kecamatan Bontoharu (Tower Sudah berfungsi), Site Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai (Tower Sudah berfungsi), Site Bontomarannu Kecamatan Bontomanai (Tower Sudah berfungsi), Site Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu (Sementara Proses Pembangunan), Site Lantibongan Kecamatan Bontosikuyu (Sementara Proses Pembangunan), Site Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur (Tower Sudah berfungsi), Site Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Timur (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), site Labuang pamajang Kecamatan Pasimasunggu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Maminasa Kecamatan Pasimasunggu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Bonea Kecamatan Pasimarannu (sementara penggalian), Site lambego Kecamatan Pasimarannu (Tower Sudah berfungsi), Site Komba-Komba (towernya sudah terbangun tinggal pemasangan perangkat), Site Pulo Madu, Site garaupa Raya, Site Karumpa dan Site Kalaotoa (tower sudah terbangun, tinggal menunggu pemasangan perangkat), Site Jinato Kecamatan Takabonerate (Towernya sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Tarupa Kecamatan Takabonerate (Tower Sudah berfungsi) dan Site Khusus Pasitallu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat).

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
D.	**Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral**				
6	Jumlah Data Sektoral yang disertai metadata dan didesiminasi	250	235	94	DiskominfoSP (Bidang Statistik)
7.	Jumlah SDM pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic sektoral	65	21	32	DiskominfoSP (Bidang Statistik)
8	Jumlah infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data	1	0	0	DiskominfoSP (Bidang Statistik)

- Jumlah Data Sektoral (data dari semua OPD) yang disertai Metadata dan diseminasi, ditargetkan 250 data dan terealisasi 235 data atau 94 %. Target belum tercapai 100% disebabkan karena beberapa perangkat daerah belum memiliki metadata, dimana untuk menyusun metadata dilakukan pengumpulan, analisis dan pengolahan data sektoral yang ada di OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang ada diselayar, dan masih terbatasnya sumber daya pengelola data di tiap perangkat daerah.

- Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral, ditargetkan 65 orang dan terealisasi 22 orang atau capaian (33,84 %). Tidak tercapainya target disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia (PNS dan PTT Perangkat Daerah) yang telah mengikuti Bimtek/Diklat teknis terkait metadata dan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh BPS, DiskominfoSP Kabupaten Kepulauan Selayar dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, di samping itu rendahnya capaian target

disebabkan karena masih kurangnya motivasi dan dukungan dari perangkat daerah masing-masing dari segi anggaran.

- Jumlah infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai ditargetkan 1 aplikasi dan tidak terealisasi karena anggaran sub kegiatan pengadaan infrastruktur data tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, untuk itu dalam tahun 2022 pelaksanaan kegiatan masih sebatas koordinasi dengan pihak terkait untuk pembuatan aplikasi aplikasi/website data statistik sektoral daerah.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
E.	**Meningkatkan Layanan Persandian**				
8	Indeks Kemanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat I	Tingkat II	100	DiskominfoSP (Bidang Sandi)

- Untuk Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, dari target Tingkat I terealisasi Tingkat II atau Capaian 100 %. Indeks Keamanan Informasi menilai 5 area pengamanan yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan asset informasi dan teknologi dan keamanan informasi. Target dapat tercapai karena telah dilakukannya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di 13 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kepemdudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD pada tahap identifikasi kerawanan dan resiko sistem elektronik.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
F.	**Meningkatkan Layanan Telekomunikasi di Desa**				
1	Persentase Desa yang terjangkau sarana telekomunikasi	82	64	96,96	Diskominfo SP (Bidang Aptika)
2	Persentase Desa yang menggunakan Website Desa	40	8	9,87	Diskominfo SP (Bidang Aptika)

- Untuk indikator Persentase Desa yang terjangkau telekomunikasi, ditargetkan 82 % (66 desa) dan terealisasi (64 desa) atau capaian 96,96 %, belum tercapainya target disebabkan karena Menara telekomunikasi di beberapa wilayah belum berfungsi dengan baik, untuk itu akan dilakukan Kerjasama dan fasiltasi provider atau perusahaan operator seluler untuk membangun tower di desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
- Desa yang ditargetkan menggunakan Website Desa 40 % (32 desa) dan terealisasi 9,87 % (8 desa) atau capaian 25 %. Tidak tercapainya target disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan SDM Aparatur Desa dalam hal Teknologi Informasi.

C. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 sebesar Rp. 8.152.424.485,- atau terserap 98,35% dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 200.800.000 atau 100 % dari target. Uraian Realisasi Program sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran per program

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.543.918.878,-	5.433.554.959,-	98,00	110.363.919,-
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	1.263.291.000,-	1.263.170.200,-	99,99	120.800,-
3.	Aplikasi Informatika	647.855.400,-	633.737.633,-	97,82	14.117.767,-
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	209.843.000,-	197.703.494,-	94,22	12.139.506,-
5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	624.420.600,-	624.258.199,-	99,9	162.401,-

2. Penyerapan Anggaran per jenis Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	2.529.319.000,-	2.460.791.695,-	97,29	68.527.305,-
2.	Belanja Barang	3.513.946.878,-	3.452.023.178,-	98,24	61.923.700,-
3.	Belanja Modal	2.246.063.000,-	2.239.609.612,-	99,71	1.981.500,-

Dari table tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia (DPA) untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tahun 2022 ini sebesar Rp. 8.289.328.878,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh

Puluh Delapan Rupiah) dan Realisasi sampai dengan Desember sebesar Rp. 8.152.424.485,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan jika dipersentasekan mencapai 98,35%. Capaian terbesar Program dan kegiatan sudah terealisasi dapat dilihat pada semua Program Kegiatan yaitu, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, meskipun ada hambatan dalam pencapaian target kinerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesungguhnya merupakan dokumen evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Dari keseluruhan target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 98,35%. Demikian LAKIP Perangkat Daerah ini disusun sebagai bahan tindak lanjut seperlunya.

Benteng, 6 Februari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Drs. AHMAD YANI

Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199402 1 004